

PEMBARUAN TANI

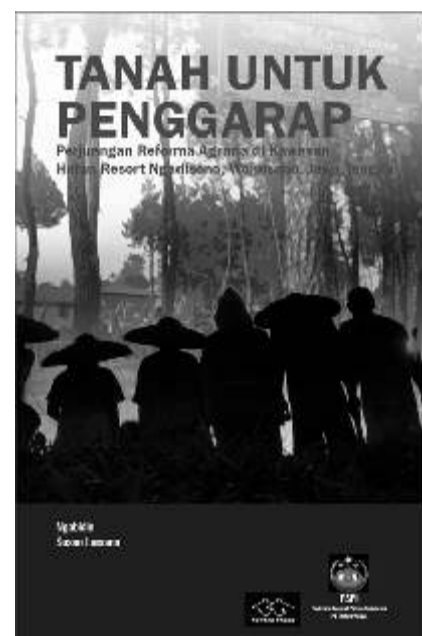
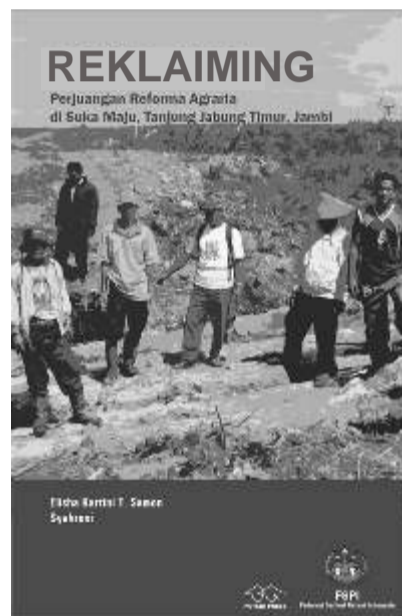
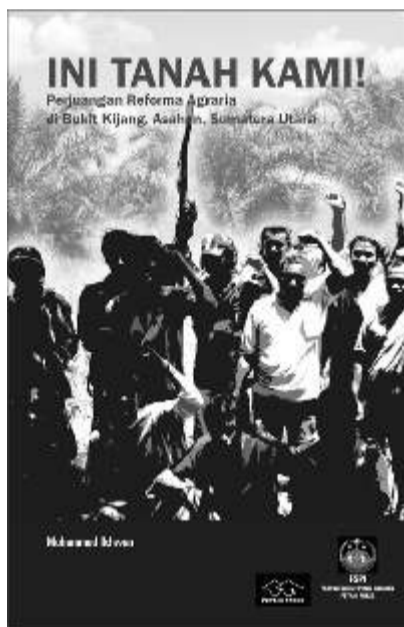
MIMBAR KOMUNIKASI PETANI



Pertanian Berkelanjutan
Berbasis Keluarga Melawan
Pemanasan Global

TANAH, AIR, UDARA
 DAN KEKAYAAN YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA
 ADALAH MILIK RAKYAT
 APABILA NEGARA TIDAK MENJAMIN,
 MAKA RAKYAT SENDIRI YANG HARUS MEMPERJUANGKANNYA

SEGERA TERBIT BUKU-BUKU DOKUMENTASI PERJUANGAN PEMBARUAN AGRARIA ANGGOTA FSPI



DAPATKAN SEGERA DI PETANI PRESS
 SEKRETARIAT FSPI
 Jl. Mampang Prapatan XIV No.5, Jakarta Selatan
 Telp. 021 7991890
 Fax. 021 799 3624
www.fspi.or.id



Penanggung Jawab: Henry Saragih
Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad
Pemimpin Redaksi: Achmad Ya'kub;
Dewan Redaksi: Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis, Irma Yani;
Redaktur Pelaksana: Cecep Risnandar
Redaktur: Muhammad Ikhwan, Tita Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;
Reporter: Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami (Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat), Muhammad Husin (Sumatera Selatan), Marselinus Moe (NTT). **Sekretaris Redaksi:** Tita Riana Zen **Keuangan:** Sriwahyuni **Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;
Penerbit: Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email: pembaruantani@fspi.or.id website: www.fspi.or.id

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| Pertanian berkelanjutan berbasis keluarga melawan pemanasan global | 3-5 |
| Neoliberalisme penyebab pemanasan global, bangun solidaritas rakyat menuju keadilan sosial | 6-7 |
| Pemanasan global, perkebunan dan agrofuel | 8-9 |
| Not hero, but zero Sindiket lembaga keuangan internasional dan keterlibatannya dalam penghancuran iklim global | 10-11 |

Pertanian berkelanjutan berbasis keluarga melawan pemanasan global

Mode produksi dan konsumsi pangan yang dikuasai dan dilakukan oleh perusahaan besar saat ini telah menghasilkan penghancuran massal terhadap lingkungan termasuk pemanasan global. Hal ini tentunya menimbulkan konsekuensi buruk bagi ekosistem dan mendorong rakyat menuju bencana.

Pemanasan global menunjukkan kegagalan model pembangunan berdasarkan konsumsi energi dari BBM yang berlebihan dimana profit/laba mengalahkan rakyat dan lingkungan.

Petani, khususnya petani kecil, merupakan orang-orang yang pertama menderita akibat perubahan iklim. Perubahan iklim yang drastis menyebabkan terjadinya kekeringan, banjir dan badai yang menghancurkan lahan pertanian, peternakan, dan rumah-rumah. Petani terpaksa menyesuaikan penggunaan benih dan sistem produksi untuk menghadapi perubahan iklim.

Banjir dan kekeringan juga menyebabkan kegagalan panen, yang pada akhirnya dapat berdampak pada meningkatnya angka kelaparan di dunia.

Dalam era globalisasi neoliberal saat ini, produksi pangan melalui produsen raksasa, perusahaan, proses distribusi dan konsumsinya berkontribusi signifikan bagi pemanasan global dan penghancuran masyarakat di pedesaan. Transportasi pangan antarbenua, produksi monokultur secara intensif, penghancuran hutan dan pembukaan lahan baru dan input kimia berlebihan sangat berkontribusi dalam perubahan iklim menuju proses pemanasan global.

Neoliberalisme sebabkan pemanasan global

Pangan baik mentah maupun kemasandistribusikan melalui transportasi ke seluruh dunia dan bahkan kita sangat akrab dengan pangan impor yang tersedia di

pasar domestik kita. Sangat gampang mendapatkan buah-buahan dari Cina atau New Zealand, misalnya.

BBM yang dipergunakan untuk proses ini membuang emisi karbon ke atmosfer. Organisasi petani Swiss, UNITERRE, memperkirakan bahwa satu kilo asparagus yang diimpor dari Meksiko membutuhkan 5 liter BBM untuk ditransport via pesawat terbang (kurang lebih 11.800 kilometer) menuju Swiss. Sementara jika diproduksi lokal, asparagus di Swiss hanya membutuhkan 0.3 liter BBM untuk mencapai langsung ke konsumen. Kira-kira penggambaran kasusnya serupa dengan fenomena kedelai, buah, daging, dan gula impor ke Indonesia.

Perkebunan raksasa di Indonesia, secara historis adalah struktur agribisnis warisan kolonial Belanda. Tinjauan dampak buruk perkebunan raksasa bukan hanya bisa dikaji secara sosial ekonomi, karena sangat meminggirkan buruh tani dan mencaplok tanah untuk penggarap (land to the tiller). Dalam perspektif lingkungan, perkebunan sangat awam menggunakan input kimia berlebihan, terutama yang menghasilkan senyawa Nitrogen Oksida (NO₂), gas yang sangat berkontribusi (nomor 3) dalam proses pemanasan global. Emisi NO₂ dari perkebunan raksasa monokultur sudah meningkat sebanyak 10 persen pada era 1990-an, dan diperhitungkan akan melonjak lebih jauh sebesar 30 persen sejak sekarang hingga tahun 2020.

Mekanisme alam sebenarnya sudah lama mengatasi masalah karbon yang bisa diserap oleh tanah serta organisme-organisme lain. Namun, perusahaan agribisnis dan produsen besar pertanian seringkali menghancurkan ekosistem dengan input kimia yang berlebihan,



apalagi dengan pembukaan lahan besar. Dalam kasus Indonesia, pembukaan lahan dengan pembakaran tentunya menghancurkan rantai makanan dan memusnahkan organisme dalam mekanisme alami. Hal ini banyak dilakukan dengan dalih ekonomi belaka, terutama oleh perkebunan karet, sawit, dan baru-baru ini untuk komoditas-komoditas agrofuel.

Laju konversi lahan pertanian dan hutan di Indonesia sangatlah mengerikan. Hal ini bisa mencapai 33,000 m² per harinya. Hutan, padang rumput dan lahan pertanian malah dikonversi untuk produksi industri, untuk lahan komersial (mal, toko, komplek ruko), proyek infrastruktur raksasa, permukiman, atau malah pariwisata. Terutama untuk industri, saat ini pemerintah merencanakan penambahan lahan industri untuk komoditas agrofuel sebesar 5.5 juta hektardiambil dari hutan dan lahan kritis yang tentunya berdampak buruk bagi lingkungan.

Menimbulkan Masalah

Agrofuel; adalah BBN (bahan bakar nabati seperti sawit, jarak,

singkong), yang seringkali dihasilkan dari sistem agribisnis monokultur, disebut-sebut sebagai solusi dari krisis energi dunia. Namun perkembangan agrofuel ini akan memicu persaingan antara mobil dan manusia, karena keterbatasan lahan dan beberapa komoditas agrofuel ini diperlukan untuk kebutuhan pangan rakyat. Agrofuel pada faktanya juga akan meningkatkan pemanasan global daripada mengurangnya, karena produksi 1 ton agrofuel dari sawit akan menghasilkan 33 ton emisi gas CO₂, atau 10 kali lebih mengerikan dari bahan bakar fosil (BBM biasa). Di Indonesia, perluasan lahan perkebunan untuk tanaman energi ini telah meningkatkan konflik agraria. Pada tahun 2006 terdapat 350 kasus konflik agraria yang terkait dengan perluasan perkebunan kelapa sawit untuk agrofuel.

Perdagangan Karbon, salah satu solusi yang ditawarkan dalam Protokol Kyoto untuk mengatasi pemanasan global. Mekanisme ini memungkinkan terjadinya perdagangan proyek pengurangan emisi karbon antara negara-negara berkembang dengan negara industri maju. Hal ini merupakan

bentuk privatisasi karbon lewat prinsip 3P; Polluter Pays Principles (prinsip dimana pihak yang menimbulkan polusi membayar kepada pihak yang mengurangi emisi karbon), setelah sebelumnya telah dilakukan privatisasi terhadap sumber daya alam lain seperti, air, tanah, bibit. Indonesia sendiri pada tahun 2007 sudah menyetujui 13 proyek perdagangan karbon. Perdagangan karbon yang dikembangkan lewat pembangunan perkebunan besar dan kawasan perlindungan tanaman di Indonesia telah menggusur hak masyarakat akan lahan dan mengurangi hak rakyat terhadap hutan, lahan dan sungai.

Kedaulatan pangan

Kami sebagai perwakilan kaum tani Indonesia percaya bahwa tidak akan ada teknologi yang mampu memperbaiki krisis ekonomi, sosial dan lingkungan seperti yang diterangkan di atas. Hanya jika ada perubahan radikal pada mode produksi, konsumsi dan distribusi dari seluruh umat manusia secara global yang bisa menjadi basis penyelesaian masalah ini.

Kami mempromosikan dan mempertahankan praktek-praktek



Salah satu Pusdiklat FSPI yang mengembangkan pertanian berkelanjutan di Bogor

pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Hal ini relevan dengan kedaulatan pangan, konsep yang kaum tani ajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sudah dipraktekkan oleh beberapa negara dan banyak organisasi rakyat di seluruh dunia.

Kedaulatan pangan merupakan hak rakyat terhadap pangan yang sehat dan cocok secara budaya, yang diproduksi secara ekologis dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan juga merupakan hak rakyat untuk menentukan sendiri sistem pangan dan pertaniannya. Karena itu, aspirasi dan kebutuhan produsen, distributor dan konsumen bisa dikerjakan secara kolektif dibandingkan dengan kebutuhan pasar dan orientasi profit/laba. Kedaulatan pangan juga memprioritaskan ekonomi lokal, sehingga sistem pangan dan pertanian yang dianut tidak bergantung ke luar, membuat produksi, distribusi dan konsumsi lebih efektif dan efisien. Secara sosial, kedaulatan pangan akan membangun ekonomi kecil berbasis keluarga dan gotong royong. Secara sosial, akan terwujud keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang adil antara si kaya dan si miskin dalam model neoliberal saat ini bisa ditangkal. Dalam perspektif lingkungan, emisi karbon dan perusakan alam bisa dikurangi dengan mengutamakan dan memenuhi kebutuhan pangan lokal.

Berdasarkan hal-hal di atas kami menuntut segera, untuk:

1. Secara total menghentikan perusahaan agribisnis raksasa: mereka inilah yang menghancurkan kehidupan petani kecil dan mengusir kami dari tanah garapan kami, secara sosial, ekonomi tidak mempromosikan keadilan karena hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, serta berperan besar menghancurkan lingkungan.

2. Mengakhiri sistem monokultur dan agrokimia dan menggantikannya dengan pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Hal ini harus didukung oleh pelaksanaan reforma agraria. Dengan memastikan bahwa



Seorang petani muda sedang mempraktekkan pertanian berkelanjutan di Pusdiklat FSPI, Bogor

penguasaan dan kepemilikan lahan-lahan pertanian serta pendukungnya oleh petani kecil

3. Implementasi kebijakan pertanian dan perdagangan pada level lokal, nasional dan internasional yang mendorong pertanian berkelanjutan dan konsumsi pangan lokal. Ini termasuk penghapusan struktur perdagangan bebas saat ini, yang

terdiri dari penghapusan subsidi ekspor dan dumping produk pertanian dari pasar internasional ke dalam pasar domestik kita.

(Disadur dari Pandangan dan Sikap FSPI mengenai pertanian berkelanjutan berbasis keluarga melawan pemanasan global)

Neoliberalisme Penyebab Bangun Kedaulatan Rakyat

Dampak dari pemanasan global telah mengakibatkan semakin intensifnya kerusakan alam dan ancaman bagi kemanusiaan. Namun pemanasan global bukanlah sebab, tetapi merupakan akibat. Pemanasan global lahir dari model pembangunan ekonomi yang berkarakter kapitalistik-neoliberal, atau sebagaimana para pendiri bangsa menyatakannya sebagai neokolonialisme-imperialisme.

Pangkal dari masalah ini adalah hasrat melakukan penguasaan dan penghisapan sumber-sumber ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing lintas negara (TNCs). Korporasi-korporasi global memanfaatkan dukungan politik elit di negara-negara kaya dan lembaga-lembaga kreditor internasional menjadikan utang luar negeri sebagai instrumen utama untuk mengakumulasi kekayaan dan menghisap sumber-sumber kehidupan rakyat. Kini kekuasaan TNCs telah menaklukkan kekuatan

ekonomi negara yang sesungguhnya diperuntukkan menegakkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

Di negara-negara miskin dan berkembang, perubahan iklim yang drastis menyebabkan terjadinya kekeringan, banjir dan badai yang menghancurkan lahan pertanian, peternakan, dan rumah-rumah. Petani terpaksa menyesuaikan penggunaan benih dan sistem produksi untuk menghadapi perubahan iklim. Banjir dan kekeringan juga menyebabkan kegagalan panen, yang pada akhirnya dapat berdampak pada meningkatnya angka kelaparan di dunia.

Dalam era pembangunan yang bercirikan kapitalistik-neoliberal saat ini, kegiatan industri, khususnya di sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan transnasional berkontribusi signifikan bagi pemanasan global dan penghancuran masyarakat,

khususnya di wilayah pedesaan.

Transportasi pangan antarbenua, produksi monokultur secara intensif, penggundulan hutan dan pembukaan lahan baru serta input kimia berlebihan sangat besar peranannya dalam melahirkan planet bumi yang semakin panas.

Di sisi lain, negara-negara industri maju seperti Amerika, Uni Eropa dan Australia terus memacu pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Hal ini tentu membuat mereka menjadi penyumbang paling besar emisi karbondioksida di dunia. Laju industrialisasi yang menyerap kebutuhan energi yang sangat besar serta pola hidup boros yang dipraktikkan, memperlihatkan bahwa negara-negara tersebut telah mempraktekan model pembangunan yang salah dan tidak adil. Yang akhirnya semakin memperburuk kondisi iklim pada tingkat global.

Medio Desember 2007, di Bali, pemimpin-pemimpin negara akan berkumpul untuk melahirkan Bali Mandate. Dan sudah dipastikan di bawah dominasi dan hegemoni neoliberalisme negara-negara industri maju, maka negara-negara industri maju akan ambil untung dan negara dunia ketiga akan dapat buntung. Dengan kata lain, keuntungan hanya di segelintir pihak belaka (negara-negara kapitalis-neoliberal, TNCs, lembaga kreditor internasional) sementara milyaran rakyat di seluruh dunia terus ditindas secara struktural. Dalam perspektif lingkungan, kondisi ini dinamakan ketidakadilan iklim.

Ketidakadilan iklim bisa diakhiri dengan azas tanggung jawab dan pengakuan atas praktek salah di masa lalu yang dilakukan negara-negara kapitalis-neoliberal. Tanggung jawab tersebut tidaklah cukup dengan menyediakan dana kompensasi bagi upaya rehabilitasi dan mitigasi perubahan iklim, sebagaimana saat ini ditawarkan



Gerak Lawan memprotes UU Penanaman Modal

Pemanasan Global, Menuju Keadilan Sosial



Pertanian rakyat ramah lingkungan

melalui program REDD. Negara-negara industri maju harus mengakui kesalahan tersebut dengan memberikan penghapusan 100% utang luar negeri bagi negara-negara miskin dan berkembang tanpa syarat. Sebagai bentuk dukungan kongkret mempromosikan pembangunan yang adil, setara, mensejahterakan rakyat, serta menjunjung tinggi pelestarian lingkungan.

Maka sudah saatnya pemerintah negara-negara dunia ketiga (negeri-negeri terbelakang akibat praktek imperialisme baru) harus merapatkan barisan, bersatu dan menyatakan sikap bahwa tidak ada model

pembangunan tunggal, yang selama ini dipaksakan. Rakyat di seluruh dunia harus melawan model pembangunan yang berkarakteristik kapitalistik-neoliberal seperti saat ini. Inisiatif rakyat mengenai transformasi kapital harus dimajukan. Dengan meninggalkan praktek neoliberalisme memperburuk keadaan. Utang, intervensi, invasi dan rejim ekonomi-politik internasional (WTO, IMF, Bank Dunia, dll) harus segera disingkirkan dari model pembangunan yang mempromosikan keadilan, kesetaraan, pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi

manusia.

Inisiasi rakyat dalam melawan segala bentuk kebijakan dan praktek neoliberal bisa dimulai dari praktek-praktek yang: (1) Berkeadilan sosial secara ekonomi-politik; (2) Berperspektif lingkungan; dan (3) Secara sosial-budaya memperhatikan kearifan lokal dan menghormati hak asasi manusia. Kebijakan Reformasi agraria dan reformasi sektor industri adalah contoh konkrit transformasi kapital oleh rakyat untuk melawan model pembangunan neoliberal yang menyebabkan kemiskinan dan kehancuran iklim global.

Pemanasan global, perkebunan,

BISNIS perkebunan adalah bisnis yang menggiurkan. Tak ada yang tidak kesengsem terjun dalam bisnis ini. Khususnya, bisnis perkebunan di negara-negara tropis dan sub-tropis, seperti Indonesia, Brasil, Argentina, serta negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin lainnya.

Sebut saja, misalnya, pemodal nasional, keluarga besar PT H.M Sampoerna. Setelah menjual sahamnya kepada perusahaan rokok Phillip Moris yang berbasis di Amerika Serikat (AS), serta merta di media nasional beredar kabar bahwa mereka akan membuka jutaan hektar lahan untuk perkebunan tebu. Lihat juga, rencana investasi modal dari Swiss yang akan membuka perkebunan tanaman Jarak di Nusa Tenggara Timur, dengan nilai investasi Rp.1

triliun.

Hal yang sama juga terjadi di Brazil. Di negara goyang samba itu, perusahaan semacam Cargill, membeli pabrik gula perkebunan tebu di Cevasa di wilayah Ribeirão Preto, São Paulo.

Minat perusahaan-perusahaan besar terhadap perkebunan sawit, tebu, jarak, jagung dan kedelai, memang tidak segencar beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi, tidak berarti volume ekspansi modal pada sektor perkebunan menurun. Bahkan, volume investasi tersebut mengikuti *trend* global. Hal ini semakin jelas setelah Presiden AS, George W. Bush, seperti diberitakan *Herald Tribune* (1/06/07), menyatakan, kebijakan baru Amerika adalah menerima target pengurangan gas emisi dunia.

Sikap baru pemerintah AS ini,

tampak berbeda dengan sikap yang mereka tunjukkan pada tahun 2000. Ketika itu, AS menolak secara tegas apa yang diatur di protokol Kyoto, mengenai pemanasan global. Tetapi, isu perubahan iklim dan pemanasan global, makin gencar dikampanyekan, sehingga isu lingkungan mulai merambah ke ranah politik global dan mempengaruhi langsung ke ruang politik nasional. Terlebih soal energi yang berasal dari pertambangan seperti minyak, gas, dan batu bara yang kian berkurang dan berpengaruh langsung terhadap perubahan iklim.

Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian mengeluarkan Perpres No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pada pasal 1 ayat 3 mulai mengintrodukir penggunaan



Perkebunan sawit bersekala luas menyebabkan pemanasan global

dan agrofuel

nuklir dan ayat 4 menggulirkan istilah biofuel. Khusus mengenai hal ini, pemerintah menunjukkan persamaan dengan AS, yang menargetkan penggunaan agrofuel/biofuel sebanyak 35 milyar galon per tahunnya. Padahal jelas lahan pertanian di AS, tidak cukup untuk memenuhi target tersebut (Holt-Gimenez, 2007).

Gayung bersambut. Setiap daerah kemudian berlomba-lomba menyatakan siap menyediakan lahan hingga jutaan hektar. Padahal kita tahu, lahan-lahan pertanian di Indonesia sudah disesaki oleh 25,4 juta petani kecil alias petani gurem. Di lain pihak, setiap tahunnya luasan perkebunan sawit selalu meningkat, sedangkan luasan lahan pertanian pangan makin menyempit. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang digulirkan sejak tahun 2006, hingga kini masih menjadi macan kertas. Apalagi, program revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan hanya menjadi mimpi penghias tidur petani.

Kalau kita telusuri lagi dengan isu perubahan iklim dan agrofuel, siapa yang diuntungkan? Jawabnya tak lain adalah perusahaan-perusahaan besar. Sebut saja perusahaan-perusahaan seperti Unilever, Pepsi, Quaker, dan Monsanto. Di Indonesia, data yang ada menunjukkan, dari total luas lahan sawit yang ditanami sebesar 5,5 juta hektar, sebanyak 4 juta hektar (67 persen) dikuasai oleh perusahaan swasta. Sisanya dikelola oleh perkebunan kecil dan perkebunan milik negara.

Dalam usaha perkebunan sawit ini, terdapat sembilan perusahaan yang menjadi pemain utamanya yakni, PT Salim Plantation, PT Golden Agri Resources, Texmaco Group, PT Asian Agri, PT Astra Agro Lestari Tbk, Hashim Group, Surya Dumai Group, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, Duta Palma Group dan PT Bakrie Sumatera Plantation. Kesembilan perusahaan raksasa ini memegang kontrol terhadap 2.920.102 hektar



Pertanian keluarga yang ramah lingkungan tergusur perkebunan besar

lahan sawit, dengan proporsi terbesarnya dikuasai oleh PT Salim Plantation dengan total lahan 1.155.745 hektar (Hernanda dan Sihombing, 2007).

Dari gambaran ini, bisa disimpulkan, program-program yang digulirkan pemerintah jelas sekali keberpihakannya kepada perusahaan besar saja. Indikatornya sederhana, program agrofuel yang digulirkan pemerintah Amerika begitu cepat direspon, lahan-lahan disediakan hingga jutaan hektar bahkan, disiapkan juga Hak Guna Usaha (HGU) hingga 95 tahun, dan kemudahan-kemudahan perizinan (hambatan non tariff dipangkas sedemikian rupa untuk menarik investasi langsung dari luar negeri). Lebih dari itu, departemen pertanian turut mencarikan lahan bagi swasta nasional yang selama ini dikenal bergerak di bidang pertambangan, hotel dan fabrikasi serta makanan seperti, PT. Medco. Medco menyatakan siap mendanai penanaman padi dengan sistem SRI (menanam padi dengan sistem intensifikasi). Untuk realisasi rencana tersebut, lahan yang dibutuhkan Medco seluas 10.000 ha.

Soalnya, apa manfaat dari

kebijakan energi ini bagi petani dan rakyat miskin? Sejauh yang bisa ditelusuri, makin berkurangnya lahan pertanian, penggusuran lahan untuk perkebunan, pembabatan hutan gambut dan tropik untuk lahan sawit serta, kekerasan dalam mempertahankan atau reklamasi lahan. Disamping itu, saat ini juga kita mengalami lonjakan harga minyak goreng, harga beras yang naik turun, harga gula, susu dan terigu. Khusus minyak goreng, bahan mentah berupa minyak sawit lebih menguntungkan dijual ke pasar internasional dari pada memenuhi kebutuhan nasional.

Inilah yang oleh Sritua Arif katakan, bahwa kita tengah berada dalam situasi ekonomi terjajah yang dicirikan oleh: (1) sebagai penyedia bahan baku bagi negara kaya; (2) sebagai pasar hasil produksi negara-negara kaya; dan (3), sebagai tempat berputarnya uang surplus dari perusahaan-perusahaan asing, yang kalau di Indonesia, kita sebut sebagai investasi.

Achmad Ya'kub

Not Hero, But Zero

Sindikatis lembaga keuangan internasional dan keterlibatannya

Dampak yang sangat besar akibat kegagalan proyek-proyek yang dibiayai utang luar negeri, telah melahirkan penolakan atas model pembangunan neoliberalisme dewasa ini. Sebuah sistem "ekonomi keruk" yang melapangkan jalan bagi pemilik kapital atas sumber-sumber kekayaan ekonomi di negara-negara penghutang. Kondisi yang melahirkan situasi kemiskinan di negara dunia ketiga dan kesejahteraan bagi negara industri maju saat ini.

Proyek dan program utang luar negeri atas sponsor lembaga kreditor seperti IMF, Bank Dunia, ADB, JBIC, dll telah menimbulkan biaya sosial yang sangat besar. Seperti pengusiran paksa, penggusuran, kerusakan lingkungan dan korupsi. Penemuan-penemuan empiris mengenai hal ini menyebutkan bahwa biaya yang ditanggung sebuah negara untuk merehabilitasi dampak yang ditimbulkan akibat sebuah proyek utang justru lebih besar dari utang baru yang diterima. Penyebabnya adalah kebijakan penyesuaian struktural lembaga-lembaga kreditor yang menghiraukan kapasitas negara-negara peminjam untuk menanggungnya. Salah satu yang menyebabkan kebijakan seperti pengurangan subsidi, privatisasi, dan liberalisasi ekonomi justru memperburuk kualitas kehidupan rakyat.

Sebuah laporan UNICEF menunjukkan bahwa berbagai program penyesuaian struktural Bank Dunia dan IMF secara substansial bertanggung jawab atas menurunnya tingkat kesehatan, gizi, dan pendidikan puluhan juta anak di dunia ketiga. Di Indonesia, penyesuaian struktural menyebabkan semakin bertumpuknya utang luar negeri dan termasuk negara yang paling lambat keluar dari dampak krisis ekonomi 1997-1998.

Beban utang yang besar juga

memaksa negara-negara miskin dan berkembang melakukan ekstraksi sumber daya alamnya untuk melayani pembayaran utang kepada negara maju. Apalagi, dampak perubahan iklim (bencana banjir, kekeringan, dan badai) menyebabkan negara miskin membutuhkan sumberdaya yang signifikan untuk merehabilitasi dampak dari bencana. Sebuah laporan yang dikeluarkan OXFAM, menyebutkan bahwa negara miskin membutuhkan setidaknya \$50 miliar per tahun untuk program rehabilitasi dan perlindungan terhadap dampak perubahan iklim.

Di tingkat domestik, hal ini berkorelasi dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan export sumber bahan mentah seperti karet, kopi, sawit, minyak dan gas. Sebuah tindakan untuk memenuhi hasrat kapital dengan mengorbankan hutan alam dan kerusakan lahan-lahan agraria akibat eksplorasi pertambangan di semua negara penghutang.

Bukannya mengoreksi kebijakan keliru ini, kebijakan ini ditanggapi secara serius oleh lembaga-lembaga keuangan internasional dengan memberikan utang baru untuk mengintensifkan dan memperluas jangkauan produksi industri-industri tersebut. Terhitung sejak tahun 1992-2004, grup Bank Dunia telah menyetujui skema utang sebesar \$11 miliar untuk membiayai 128 proyek energi fosil di 45 negara, termasuk ekstraksi, pembangkit listrik, serta kebijakan reformasi sektor energi. Hasil perhitungan yang telah dilakukan, proyek-proyek tersebut menyumbang sekitar 43,4 miliar ton emisi karbon dioksida bagi penduduk dunia. Parahnya, Hampir dari setengah dari proyek untuk minyak, gas, dan batubara yang disponsori bank dunia tersebut (dan lebih dari 80% proyek untuk minyak) didesain untuk memenuhi kebutuhan pasar global,

terutama di Negara-negara industri maju.

Dalam menjalankan proyek-proyek utang baru tersebut, pihak kreditor mewajibkan negara penghutang untuk menjalankan agenda-agenda penyesuaian struktural seperti melakukan privatisasi dan liberalisasi ekonomi. Misalnya agenda privatisasi air, program administrasi pertanahan, serta reformasi sektor kehutanan bagi masuknya investasi baru. Agenda tersebut pada kenyataannya justru mendorong kerentanan terhadap lahirnya bencana ekologis baru di negara penghutang.

Sudahlah negara miskin dan berkembang menerima dampak kebijakan ekonomi neoliberal yang keliru, seperti pembayaran utang yang besar, bencana lingkungan, konflik sosial dan pelanggaran HAM, serta "pengurusan" sumber daya alam. Mereka juga harus menanggung akibat langsung pemanasan global yang disebabkan oleh sumbangan emisi karbon dari model pertumbuhan ekonomi negara industri maju.

Gagasan model pembangunan adil dan berkelanjutan yang telah direspon oleh para lembaga pemberi utang, tidaklah mengurangi cacat bawaan dari praktek lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam sindikasi praktek kotor penyaluran utang. Bahkan, di tengah kondisi ketergantungan para elit di negara penerima utang terhadap dana utang, menyebabkan pemerintah negara-negara peminjam tidak akan berani menyulut pertentangan dengan pihak kreditor, meskipun terdapat berbagai kesalahan dan penyelewengan sebuah proyek [Raffer, 1999].

Kolonialisme Baru

Lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan Asian Development Bank, tidak hanya dipandang telah bersikap tidak

dalam penghancuran iklim global

transparan dan tidak akuntabel. Keduanya diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara Dunia Pertama pemegang saham utama mereka, untuk mengintervensi negara-negara penerima utang (Rich, 1999; Stiglitz, 2002; Pincus dan Winetr, 2004).

Keberadaan Bank Dunia dan IMF, yang ditopang oleh negara-negara industri kaya lainnya melakukan upaya sistematis dalam menghadirkan pola baru kolonialisme pusat-pusat kapitalisme dunia di bawah kepemimpinan Amerika. Hal ini bisa dilihat dari tujuan pendirian dan sistem pengambilan keputusan yang berlaku di kedua lembaga ini. Berbagai persyaratan (*conditionalities*) yang menyertai setiap transaksi utang, digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara maju. Misalnya kewajiban memakai konsultan asing, teknologi serta barang-barang produksi yang berasal dari negara yang meminjamkan utang.

Memburuknya tingkat kesejahteraan masyarakat dunia dewasa ini, wajar kiranya jika dikatakan bahwa penyaluran utang luar negeri selama ini hanyalah sebagai alat untuk "menguras dunia" dan menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Demi tujuan tersebut negara-negara kreditor melancarkan intervensinya pada negara-negara pengutang dengan cara melanggengkan rezim-rezim "pelayan". Rezim boneka ini bekerja untuk melahirkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan negara-negara maju pemegang saham utama lembaga keuangan internasional sesuai keinginan AS.

Penghancuran Iklim

Maraknya isu perubahan iklim akhir-akhir ini mengharuskan tiap-tiap Negara di dunia memformulasikan kebijakan mengenai pengurangan (mitigasi)

emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energinya. Namun yang perlu dilihat bahwa terjadinya global warming tidak terlepas dari peran lembaga keuangan Internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang telah beroperasi berpuluh-puluh tahun untuk membiayai proyek yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan penggunaan energi fosil sebagai menyumbang terbesar terjadinya pemanasan global. Menjadi sangat ironis jika sekarang lembaga keuangan internasional tersebut berperan menjadi penyelamat lingkungan dengan mendorong inisiatif untuk mengatasi pemanasan global, karena mereka selama bertahun-tahun telah mendukung proyek penghancuran iklim global dengan utang yang mereka kururkan kepada korporasi dan pemerintah negara berkembang.

Dalam Laporan rutin International Financial Corporation (IFC) tahun 2007 menyebutkan bahwa Bank Dunia memberikan utang ke sektor swasta (*private sector loan*) lebih dari \$645 Million kepada perusahaan minyak dan gas bumi. Jumlah ini meningkat 40 % dibandingkan tahun 2006. Disamping itu komitmen Bank Dunia untuk membiayai perusahaan swasta yang bergerak di sektor energi pada tahun 2006 meningkat dari \$2.8 billion to \$4.4 billion. Sektor minyak dan gas serta pembangkit tenaga memperoleh porsi terbesar dengan 77% dari total

komitmen sedangkan sektor energi terbarukan hanya memperoleh 5 % dari total komitmen.

Jelas bahwa IFC yang termasuk dalam group Bank Dunia telah mendorong terjadinya pemanasan global dengan melalui utang yang mereka berikan kepada sektor swasta untuk membiayai ekstraksi sumber daya alam terutama energi fosil yang menyebabkan meningkatnya emisi karbon.

Telah terjadi peningkatan jumlah uang untuk membiayai proyek di industri ekstraktif sebesar 60% dari tahun 2005 yang diberikan IFC kepada perusahaan multinasional, sedangkan proyek untuk ekstraksi bahan bakar minyak meningkat sebesar 66%. Group Bank Dunia terutama IFC yang lebih memilih membiayai perusahaan multinasional yang bergerak dibidang ekstraksi minyak dan gas, didasari pada keuntungan yang akan kembali atau dengan kata lain Bank Dunia lebih memilih menerapkan *bisnis as usual* dalam praktek kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Dunia akan mengabaikan faktor pembangunan yang berkelanjutan asalkan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dani Setiawan & Yuyun Harmono

| World Bank Group Extractive Industries Projects FY05 & FY06 | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | (million US\$) | | | | | |
| | FY05 | | FY06 | | % change | |
| | All Extractives | Fossil Fuels | All Extractives | Fossil Fuels | All Extractives | Fossil Fuels |
| World Bank | 327 | 101,8 | 452 | 414 | 38% | 307% |
| IFC | 334,3 | 274 | 533,98 | 454,5 | 60% | 66% |
| MIGA | 94 | 75 | 110 | 0 | 17% | -100% |
| World Bank Group | 755,3 | 450,8 | 1096 | 869 | 45% | 93% |

Sumber : Laporan IFC tahun 2007 diolah



NEOLIBERALISME

SEBABKAN

PEMANASAN GLOBAL